

WORKING PAPER

SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH:
CHALLENGES AND POLICY STRATEGIES

Solikin M. Juhro

2015

The conclusions, opinions and views of the authors in this paper are those of the authors alone and do not constitute the official conclusions, opinions, and views of Bank Indonesia.



SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH: CHALLENGES AND POLICY STRATEGIES¹

(PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN)

Solikin M. Juhro²

Abstract

The last two decades was a very dynamic period, characterized by many challenges and important moments of performance of Indonesian economy. In the midst of two major crises, the Asian financial crisis of 1997/98 and the global financial crisis of 2008/09, stabilization and structural policy measures have been taken by the Government and Bank Indonesia, as well as related policy authorities to make the Indonesian economy recovers and grows stronger. The Indonesia's economic performance in the post global financial crisis is quite impressive, with an economic growth of around 5.5% averagely in the past five years, accompanied by a downward trend in inflation and the ratio of external debt to GDP, and the increasingly resilient financial sector in line with the improvement of business and investment climate.

Amidst that impressive performance, the complexity of the structural challenges that are facing the Indonesian economy should be observed. In addition to fairly wide current account deficit, the quality of economic development need to be improved in order to be transmitted on improving quality of the social welfare at large. On a global scope, the competitiveness of the Indonesian economy in general also has to be strengthened further if Indonesia aim to become a major player in the era of the ASEAN Economic Community (AEC). To answer these challenges, the implementation of strong and consistent structural reform policies are sufficiently required. The structural reforms are expected to not only accelerate Indonesia's transition into developed economies and avoid the middle income trap, but also make the Indonesian economy grows in a sustainable level, in order to further reduce poverty and inequality. To achieve these ideal conditions, Indonesia is required to be able to further optimize the natural resource management, build reliability in the industrial sectors, build resilience in energy and foods, strengthen the financing structure of the economy, develop inclusive economic activities and strengthen the basic capital of national development. These strategic steps require pre-requisite of

¹ To be published as a chapter in a book entitled, *Growth Diagnostic: Growth Strategy for Supporting Structural Reform in Indonesia*, Juda Agung, Edimon Ginting, M. Solikin Juhro, and Yoga Affandi (Eds.), Bank Indonesia and the Asian Development Bank (ADB), 2016.

² Solikin M. Juhro is a Senior Economist and the Head of Bank Indonesia Institute of Bank Indonesia, the Central Bank of Republic of Indonesia.

monetary stability and financial system stability, as elements of continuity in supporting the implementation of sustainable development.

Keywords: *Sustainable Economic Growth, Macroeconomic Policy, Structural Reform, Central Bank Policy, Bank Indonesia.*

JEL: *E02, E30, E58, E60.*

Abstrak

Dua dekade terakhir merupakan periode yang sangat dinamis serta diwarnai oleh banyak tantangan dan momen penting bagi pencapaian kinerja perekonomian Indonesia. Di tengah terpaan dua krisis besar, yaitu krisis keuangan Asia 1997/98 dan krisis keuangan global 2008/09, beberapa langkah kebijakan stabilisasi dan struktural dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis telah diambil oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia, serta otoritas kebijakan terkait untuk menjadikan perekonomian Indonesia tumbuh lebih kuat. Capaian kinerja ekonomi Indonesia terbilang cukup mengesankan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5% dalam lima tahun terakhir, disertai dengan tren penurunan inflasi dan rasio utang luar negeri terhadap PDB, serta semakin resiliensnya sektor keuangan sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi.

Di tengah beberapa capaian tersebut, kompleksitas tantangan yang bersifat struktural yang dihadapi perekonomian Indonesia juga patut dicermati. Selain masih cukup lebarnya defisit transaksi berjalan, kualitas pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan lagi agar dapat ditransmisikan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas. Sementara itu, dalam lingkup global, daya saing perekonomian Indonesia secara umum juga harus ditingkatkan lagi jika ingin menjadi pemain utama di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan implementasi kebijakan reformasi struktural yang ekstra kuat dan konsisten. Reformasi struktural tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat transisi Indonesia menjadi perekonomian maju dan menghindari middle income trap, namun juga menjadikan perekonomian Indonesia tumbuh secara berkelanjutan, agar dapat semakin menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, Indonesia dituntut untuk dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, membangun kehandalan di sektor industri, membangun ketahanan di bidang energi dan pangan, memperkuat struktur pembiayaan perekonomian, mengembangkan kegiatan ekonomi inklusif dan memperkuat kemampuan modal pembangunannya. Hal terakhir yang perlu digarisbawahi adalah bahwa langkah-langkah strategis tersebut memerlukan pra syarat terjaganya stabilitas moneter dan stabilitas

sistem keuangan sebagai elements of continuity dalam mendukung perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Keywords: Sustainable Economic Growth, Macroeconomic Policy, Structural Reform, Central Bank Policy, Bank Indonesia.

JEL: E02, E30, E58, E60.

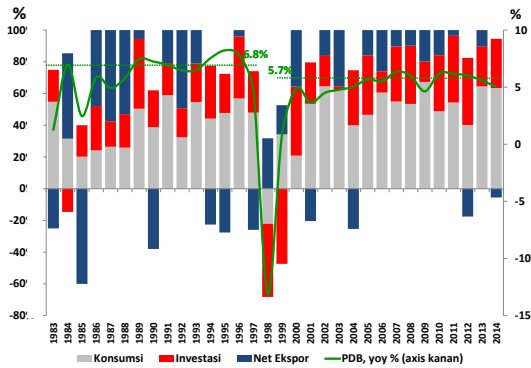
I. Potret Kebangkitan Ekonomi di Era Dua Krisis Keuangan

Dua dekade terakhir ini merupakan periode yang sangat dinamis dan diwarnai oleh banyak tantangan dan momen penting bagi pencapaian kinerja perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut perekonomian Indonesia juga mengarungi dua kejadian krisis yang tergolong besar, yaitu krisis keuangan Asia 1997/98 dan krisis keuangan global 2008/09 (*Global Financial Crisis/GFC*). Dalam menghadapi kedua krisis besar tersebut, perekonomian Indonesia memiliki dimensi permasalahan dan ketahanan yang berbeda. Krisis keuangan Asia 1997/98 menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian berat serta peningkatan kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, tidak hanya di sektor keuangan, namun juga sektor riil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1999 mengalami penurunan secara signifikan, tercatat sebesar -13.1%. Permasalahan berat yang terjadi pada masa krisis tersebut secara tidak langsung mengindikasikan adanya beberapa kelemahan struktural ekonomi yang kurang terdeteksi maupun kelemahan dalam penerapan kebijakan ekonomi makro, yang selanjutnya menimbulkan distorsi ekonomi serta tidak sehatnya struktur dan perkembangan perekonomian nasional. Dengan kondisi tersebut, proses pemulihan ekonomi Indonesia secara relatif berjalan lebih lama dan memakan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan negara kawasan lain yang terkena krisis, seperti Malaysia, Philipina, Thailand, dan Korea.

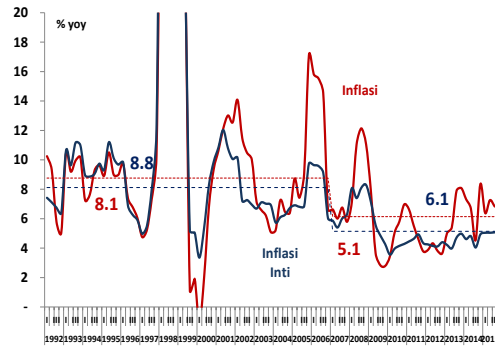
Sementara itu, pada saat terjadi krisis keuangan global 2008/09 kondisinya sangat berbeda. Di tahun 2009 perekonomian Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat, sebagai cerminan keberhasilan beberapa langkah stabilisasi dan kebijakan struktural dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis keuangan Asia 1997/98, sehingga masih dapat tumbuh sebesar 4.5%; dan merupakan salah satu dari sedikit perekonomian yang dapat tumbuh positif di tengah krisis. Bahkan, di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung hingga saat ini, dengan merembetnya krisis keuangan ke berbagai negara kawasan Eropa, perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir tumbuh cukup kuat, dengan rata-rata 5.5% (Grafik 1.1).

Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa episode pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut tidak disertai oleh peningkatan tekanan inflasi. Perkembangan dalam 1 dekade terakhir menunjukkan bahwa perkembangan inflasi berada dalam tren yang lebih rendah, menuju era *single digit*. Dalam hal ini, sejalan dengan peningkatan kredibilitas kebijakan pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia bersama pemerintah di era penerapan *Inflation Targeting Framework* (ITF) sejak 2005, inflasi inti mengalami penurunan signifikan, dari rata-rata 8,1% pada periode sebelum penerapan ITF menjadi rata-rata 5,1% pada periode setelah penerapan ITF (Grafik 1.2).

Grafik 1.1. Sumber Pertumbuhan Ekonomi



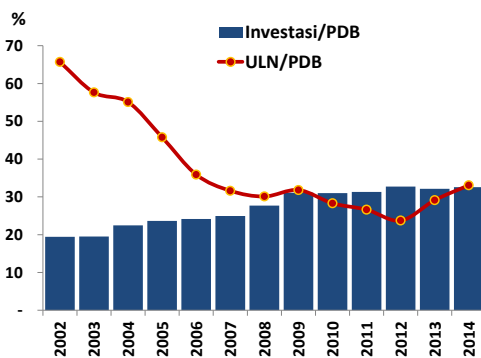
Grafik 1.2. Inflasi IHK dan Inflasi Inti



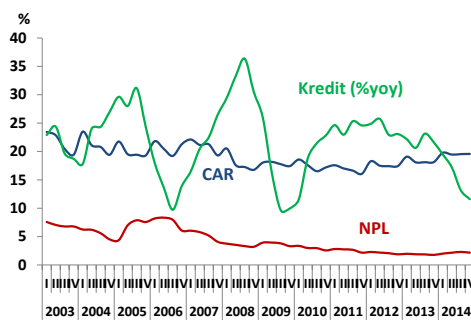
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

Buah dari langkah stabilisasi dan kebijakan reformasi struktural pasca krisis keuangan Asia 1997/08 juga tercermin pada peningkatan iklim usaha dan investasi. Sementara itu, disiplin fiskal yang konsisten juga telah menyebabkan tren penurunan utang luar negeri. Rasio utang luar negeri (ULN) terhadap PDB yang sebelumnya sekitar 65% di awal 2002 menurun menjadi 33% di 2014. Tidak hanya itu, sektor keuangan Indonesia juga tumbuh sangat kondusif dan semakin resilien didukung oleh permodalan yang semakin kuat dan risiko kredit yang terkelola dengan baik. *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami perbaikan signifikan dari masing-masing 7,6% dan 23,4% di awal 2000 menjadi 19,6% dan 2,2% di 2014.

Grafik 1.3. Investasi dan Utang Luar Negeri (% PDB)



Grafik 1.4. CAR, NPL dan Pertumbuhan Kredit (%)



Sumber: CEIC, data diolah

Sumber: Bank Indonesia

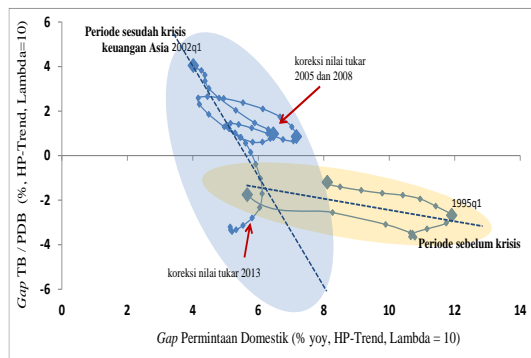
Perkembangan yang perlu diperhatikan adalah adanya pergeseran peran sumber pertumbuhan ekonomi dari kegiatan ekspor ke permintaan domestik. Dalam hal ini, peran

permintaan domestik mengalami peningkatan peran dari rata-rata 80% pada periode sebelum krisis keuangan Asia 1997/98 menjadi 90% pada periode setelah krisis. Perkembangan tersebut terus berlanjut pada periode setelah krisis keuangan global 2008/09, dimana pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat ditopang oleh tingginya konsumsi di tengah kegiatan investasi yang tetap kuat. Kuatnya permintaan domestik tersebut tidak terlepas dari peningkatan daya beli, cukup kondusifnya iklim investasi, dan terjaganya keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian ke depan.

Namun, pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki konsekuensi pada perkembangan sektor eksternal yang terlihat belum begitu menggembirakan. Defisit Transaksi Berjalan (TB) masih cukup lebar dalam 4 tahun terakhir (di kisaran 3% dari PDB). Kinerja ekspor sebagai penopang perekonomian sangat dipengaruhi oleh perkembangan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas internasional, yang saat ini dalam tren melemah. Sementara itu, impor masih tumbuh cukup tinggi didorong oleh permintaan domestik yang masih kuat, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Secara sekilas, kondisi tersebut memang tidak lepas dari daya saing industri domestik yang rendah, disamping struktur industri yang masih sangat tergantung pada impor bahan baku dan barang modal.³ Beberapa kelemahan tersebut menyebabkan permasalahan defisit TB tak kunjung mereda. Bahkan, dengan masih adanya kendala kapasitas produksi di dalam negeri, upaya untuk mendorong peningkatan permintaan domestik akan semakin memperlebar defisit TB mengingat masih tingginya impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung industri domestik. Dengan adanya "*balance of payments-constrained growth*" tersebut, apabila tidak ada langkah kebijakan yang bersifat struktural yang kuat dan konsisten, defisit TB akan terus melebar sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan memiliki risiko untuk tidak berkelanjutan (Grafik 1.5).

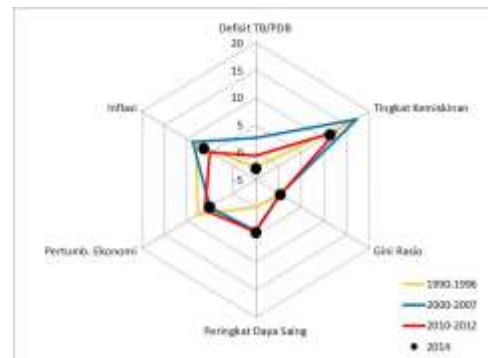
³ Apabila diamati lebih lanjut, telah terjadi tren penurunan pangsa *tradable sectors* (meliputi sektor industri manufaktur, pertanian, dan pertambangan), dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Dengan karakteristik industri dalam negeri yang '*domestic oriented*' disertai dengan konten impor yang tinggi, kinerja korporasi yang banyak berorientasi pada SDA juga terus menurun sejalan dengan anjloknya harga komoditas internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 1.5. Defisit TB dan Permintaan Domestik



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, data diolah

Grafik 1.6. Kinerja Perekonomian Indonesia



Sumber: BPS, Bank Dunia

Dalam lingkup yang lebih luas, kompleksitas permasalahan dihadapi perekonomian Indonesia juga patut dicermati. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang kuat dan kecenderungan inflasi yang lebih rendah, terdapat fenomena "growth paradox" terkait dengan kualitas pembangunan ekonomi belum dapat dikatakan optimal, yang tercermin pada angka kemiskinan yang belum menurun secara cepat, di tengah kecenderungan kenaikan angka rasio gini. Sementara itu, dalam lingkup global, daya saing perekonomian Indonesia juga masih belum beranjak ke posisi yang membanggakan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini terutama sejak tahun 2014, ranking daya saing Indonesia cenderung membaik, ke 37 (2014), namun di tingkat regional, tingkat daya saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Grafik 1.6).

Urgensi penguatan daya saing menjadi semakin mengemuka sejalan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah berada di depan mata. Hal ini terkait dengan masih adanya beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan pemanfaatan ruang dalam MEA menjadi tidak optimal bagi Indonesia. Beberapa permasalahan struktural terkait dengan daya saing berusaha yang masih belum terlalu tinggi akibat belum memadainya kebutuhan dasar dalam melakukan penanaman modal seperti kelembagaan dan infrastruktur, efisiensi perekonomian yang masih rendah, termasuk inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain, serta inovasi yang relatif belum banyak. Permasalahan ini perlu dicermati karena dikuatkan menjadikan Indonesia bukan sebagai pemain utama, namun hanya sebagai target pasar. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sekitar 64,7% impor Indonesia berasal dari ASEAN. Kompleksitas permasalahan di atas tentunya memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.

II. Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Beberapa Tantangan Struktural

Potensi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah-Panjang

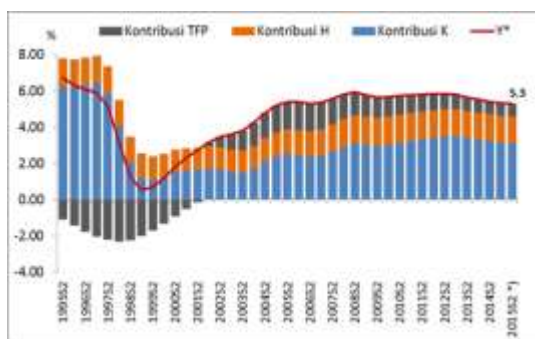
Sampai dengan akhir 2014 lalu, Indonesia masih mantap berada dalam kategori negara berpenghasilan menengah, kendati mendapat tekanan dari gejolak perekonomian global yang cukup kuat. Ke depan, percepatan transisi ke perekonomian maju berpendapatan tinggi dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan perlu menjadi pokok perhatian. Proses transisi tersebut menuntut adanya keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada kehandalan sektor industri dan kemampuan pelaku ekonomi dalam beradaptasi dengan globalisasi.

Saat ini, pembangunan landasan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar yang bersifat struktural. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan implementasi kebijakan reformasi struktural yang ekstra kuat dan konsisten. Pengalaman di banyak negara menunjukkan pentingnya faktor kehandalan industri dan peran aktif dalam rantai nilai global (*global value chain*) sebagai pra kondisi bagi proses transisi yang cepat ke negara maju berpendapatan tinggi. Negara-negara yang mampu membangun kehandalan industrial dan memperkuat peran dalam rantai nilai global terbukti cenderung lebih mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan output per kapita dan mengentaskan kemiskinan. Sebaliknya, yang lambat membangun pra kondisi tersebut dapat terjebak dalam kelompok perekonomian berpendapatan menengah untuk waktu yang lama, yang sering disebut sebagai jebakan negara berpendapatan menengah, atau *middle income trap*. Pada fase ini, perekonomian Indonesia tidak hanya akan tumbuh stagnan, namun juga potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang juga akan terus tergerus.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir berada di sekitar angka 5% dan terindikasi lebih rendah dari pertumbuhan output potensial, yang diperkirakan sekitar 5,3% (Bank Indonesia, 2015). Di tengah dampak krisis keuangan global 2008/09 yang masih berlanjut, terutama penurunan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas internasional, pertumbuhan output potensial Indonesia berada dalam tren yang menurun sejak 2011. Tren penurunan pertumbuhan output potensial Indonesia tersebut juga sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan negara berkembang lain. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa ekonomi domestik sangat mengandalkan ekspor sumber daya alam (SDA) sehingga pada saat *term of trade* (TOT) barang ekspor SDA menurun, pertumbuhan ekonomi juga turun signifikan. Pengaruh TOT yang turun mengakibatkan sektor primer juga turun tajam dan diikuti oleh sektor sekunder dan sektor tersier.

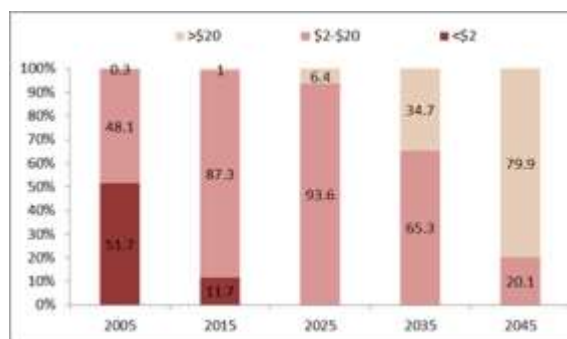
Kondisi tersebut sejalan juga dengan potret spasial dimana ekonomi Sumatera dan Kalimantan mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan sektor berbasis SDA. Perlambatan wilayah tersebut berpengaruh ke penurunan kinerja manufaktur dan jasa di Jawa. Moderasi ekonomi di Kalimantan dan sebagian besar Sumatera adalah akibat dari turunnya ekspor dan harga komoditas SDA. Ekonomi Jawa juga melambat terkait dengan lemahnya permintaan global maupun domestik terhadap produk manufaktur serta terbatasnya investasi, meski masih relatif kuat dengan dukungan konsumsi rumah tangga.

Grafik 1.7. Pertumbuhan Ekonomi Potensial



Sumber: Bank Indonesia (2015)

Grafik 1.8. Perkembangan Kelas Menengah



Sumber: Bank Dunia

Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia akan terus berkembang dengan topangan masyarakat kelas menengah yang akan semakin besar, sejalan dengan bonus demografi yang diperkirakan masih akan terjadi dalam 10 - 15 tahun ke depan. Pada tahun 2005 porsi kelas menengah di Indonesia mencakup 48% dari total populasi, atau sekitar 109 juta orang. Kelompok ini terus mengalami peningkatan signifikan menjadi sekitar 94% (254 juta orang) pada 2025, namun terus menurun hingga 2045, seiring dengan perkembangan kelompok golongan atas/kaya (Anglingkusumo dan Sianipar, 2012). Peningkatan kelas menengah tersebut tentunya akan mengakselerasi permintaan domestik, dan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi pasca krisis keuangan global 2008/09 yang sempat melambat dalam 2 tahun terakhir. Dengan prognosa peningkatan permintaan domestik yang akan semakin tinggi, hal ini memberikan implikasi mengenai perlunya kesiapan teknologi dan perbaikan kapasitas inovasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan permintaan domestik tersebut. Karena jika tidak, kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui impor, yang tentunya dapat membebani kondisi neraca pembayaran dan potensi pertumbuhan ekonomi ke depan.

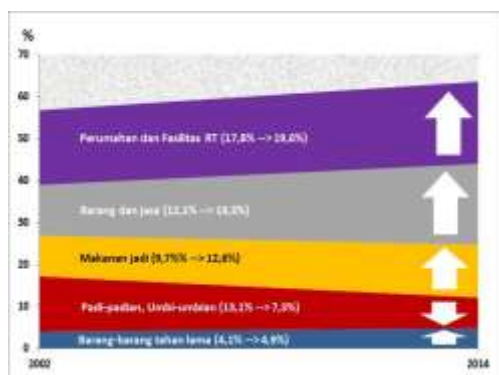
Beberapa Tantangan Struktural

(i) Kapabilitas Sektor Industri dan Kapasitas Produksi

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan di sisi penawaran terasa semakin mengemuka akibat tertinggalnya kemampuan produksi dalam memenuhi permintaan kelas menengah yang semakin kompleks. Dari sisi permintaan, perkembangan kelas menengah telah mengubah struktur permintaan agregat. Sementara itu, dari sisi penawaran, kapabilitas industri dan kapasitas produksi yang masih terbatas menimbulkan persoalan kesenjangan pasokan domestik dan daya saing di pasar global. Kedua hal ini kemudian tercermin pada kinerja neraca transaksi berjalan yang melemah, serta pertumbuhan pendapatan per kapita dan pengentasan kemiskinan yang melambat.

Keterbatasan sisi penawaran dalam merespons perkembangan permintaan domestik salah satunya disebabkan oleh pesatnya perkembangan kelas menengah. Perkembangan pesat kelompok penduduk yang sudah tidak miskin ini telah menggeser struktur permintaan barang dan jasa dalam perekonomian ke arah yang lebih kompleks, bernilai tambah tinggi dan beragam. Hal ini terlihat misalnya pada struktur permintaan atas barang-barang konsumsi oleh penduduk dalam 10 tahun terakhir. Proporsi konsumsi barang-barang tidak tahan lama (*non-durables*) hasil pertanian semakin berkurang, sementara proporsi permintaan untuk makanan olahan, perumahan dan fasilitas rumah tangga, yang tergolong sebagai barang tahan lama (*durables*) semakin meningkat (Grafik 1.9). Ilustrasi lain adalah keragaman pasar konsumsi domestik, dimana segmen pasar konsumsi semakin beragam meliputi segmen konsumen miskin, menengah dan atas (Grafik 1.10).

Grafik 1.9. Pangsa Konsumsi Barang Tahan Lama dan Tidak Tahan Lama



Sumber: BPS, data diolah

Grafik 1.10. Segmen Pasar Konsumsi



Sumber: Bank Dunia, data diolah

Ditengah pergeseran struktur permintaan agregat tersebut, struktur produksi di sisi penawaran dalam jangka panjang masih belum sepenuhnya menyesuaikan. Secara umum, struktur produksi dalam negeri saat ini dalam banyak aspek masih bercirikan struktur produksi yang dulu membawa Indonesia keluar dari negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan menengah. Struktur tersebut sangat kental diwarnai oleh kegiatan ekstraksi primer berbasis kekayaan sumber daya alam (SDA) dan industri-industri padat karya berteknologi rendah. Di tengah pesatnya ekspansi kelas menengah dan meningkatnya keragaman permintaan barang dan jasa yang mengiringinya, struktur produksi yang ada saat ini terasa semakin usang. Struktur permintaan barang dan jasa lebih mencerminkan kondisi masyarakat di negara berpendapatan menengah atau bahkan tinggi, sementara struktur di sisi penawaran secara umum masih banyak mencerminkan kondisi di sebuah negara berpendapatan rendah. Sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut, perekonomian Indonesia semakin membutuhkan basis keunggulan yang berbeda dan kehandalan sektor industri yang meningkat.

(ii) Ketahanan Energi dan Pangan

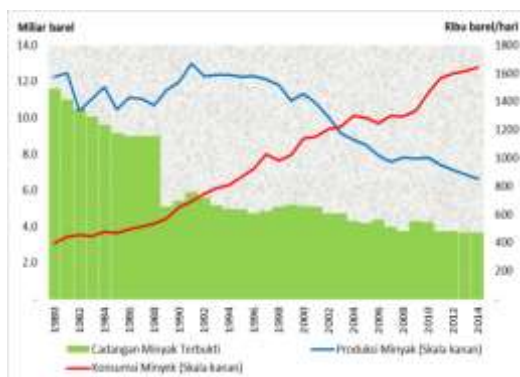
Ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran dalam jangka menengah panjang, sebagaimana yang disampaikan diatas, terlihat pula pada sektor energi dan pangan sebagai dua sektor penghasil input penting bagi keseluruhan proses produksi nasional. Mengingat pentingnya peran sektor energi dalam suatu perekonomian, maka terjadinya ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran pada sektor dimaksud dapat menimbulkan gangguan terhadap keseluruhan sistem perekonomian. Sejalan dengan terus meningkatnya pendapatan per kapita seiring dengan ekspansi kelas menengah, maka tren konsumsi energi domestik pun terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% per tahun dan rata-rata laju pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,5% per tahun, konsumsi minyak tumbuh rata-rata 4,3% per tahun. Sejak tahun 2003, ketika Indonesia mulai memasuki kelompok negara berpendapatan menengah, konsumsi minyak domestik sudah melampaui kemampuan produksi, atau mengalami defisit (Grafik 1.11).

Terjadinya defisit ganda sejak tahun 2013, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan dan ketergantungan pembangunan pada minyak bumi yang cukup besar. Impor minyak yang tinggi menyebabkan tekanan tidak hanya pada kondisi fiskal, namun juga pada transaksi berjalan. Disamping itu, terus meningkatnya konsumsi domestik disertai dengan kondisi global yang tidak menguntungkan berpotensi terus melebarkan defisit transaksi berjalan dan memperlemah ketahanan fiskal. Secara lebih spesifik, pengaruh besarnya subsidi BBM dalam beberapa tahun

terakhir juga tercermin pada terjadinya defisit pada keseimbangan primer dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut akan mempersempit ruang fiskal dan dapat menghambat proses penyesuaian yang diperlukan dalam jangka menengah panjang, yang pada gilirannya berisiko meningkatkan kerentanan perekonomian.

Selanjutnya, di sektor pangan, cukup besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa dan disertai dengan laju pertumbuhan populasi yang relatif tinggi (1,5% per tahun) turut berimplikasi pada tren peningkatan konsumsi pangan. Namun demikian, terbatasnya perkembangan produksi pangan di Indonesia masih belum dapat mengejar peningkatan konsumsi dimaksud. Terjadinya ketimpangan antara produksi dan konsumsi pada neraca bahan pangan beberapa komoditas pokok dan strategis mendorong kebijakan impor menjadi solusi jangka pendek (Tabel 1.1). Berdasarkan prognosa Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, tahun 2012 ditandai dengan ketersediaan yang belum mencukupi kebutuhan, sehingga memerlukan tambahan dari impor. Hal ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun ke depan.

Grafik 1.11. Cadangan, Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia



Sumber: BP Statistical Review of World Energy, 2014

Tabel 1.1. Tingkat Ketergantungan Impor Beberapa Komoditas Pangan

Komoditi	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beras	1.2	1.0	2.3	7.9	5.8	3.9
Daging Sapi	10.4	14.2	17.2	13.1	18.5	8.4
Kedelai	60.1	57.4	65.8	71.1	71.5	46.5
Gula	34.4	51.3	52.3	60.3	65.6	72.3

Sumber: Kementan (2013)

Permasalahan mendasar di sektor pertanian sejak dari hulu hingga hilir, berdampak pada terbatasnya pertumbuhan produksi pangan domestik. *Pertama*, permasalahan mendasar terkait semakin terbatasnya lahan pertanian akibat meningkatnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Pesatnya laju konversi ini dipicu oleh lebih menariknya hasil dari sektor non-pertanian dibandingkan sektor pertanian. *Kedua*, pengelola usaha pangan (a.l. pertanian dan peternakan) mayoritasnya berskala kecil dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, sarana produksi, infrastruktur, dan informasi. Kondisi-kondisi ini menyebabkan sulitnya memperoleh keuntungan

yang memadai (*increasing return*) dari pengelolaan usaha pangan dan rendahnya daya saing global dibandingkan dengan negara lain.

(iii) Ketersediaan Pembiayaan Pembangunan

Ketersediaan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan sangat berpengaruh pada keseluruhan upaya mempercepat proses transisi Indonesia ke negara maju. Upaya penguatan modal dasar pembangunan dalam rangka memperbesar minat *off shoring* produsen global yang berkualitas dapat membantu memperkuat struktur pembiayaan tersebut melalui jalur aliran modal PMA. Lebih dari itu, tersedianya ruang fiskal yang cukup untuk mendukung perbaikan modal dasar pembangunan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan terkait optimalisasi pembiayaan pembangunan ke depan.

Tabel 1.2. Perbandingan Pembiayaan Pembangunan

	Malaysia	Thailand	Filipina	Vietnam	Indonesia
Pangsa Kapasitas Pasar Obligasi Terhadap PDB	95.31	72.28	35.84	23.5	15.13
<i>Pemerintah</i>	53.86	54.92	30.06	23.19	12.96
<i>Swasta/Korporasi</i>	41.45	17.36	5.78	0.31	2.17
Pangsa Kapitalisasi Saham Terhadap PDB	135.76	106.32	91.95	24.74	47.51
Rasio Aset Investasi Terhadap PDB					
<i>Dana Pensiun</i>	60.14	6.24			1.71
<i>Reksa Dana</i>	34.00	3.68		0.30	2.17
<i>Asuransi</i>	21.20	20.24		3.84	6.96

Sumber: Bank Dunia, Bloomberg (2014)

Aspek lain terkait tantangan pembiayaan perekonomian adalah masih terbatasnya pembiayaan jangka panjang melalui pasar obligasi dan saham, yang bahkan relatif tertinggal dibandingkan dengan kawasan. Kapasitas dan likuiditas pasar obligasi korporasi masih rendah dan tingkat partisipasi investor institusional seperti dana pensiun/asuransi yang merupakan pemberi pinjaman jangka panjang juga masih rendah. Hal ini tercermin dari terbatasnya dana masyarakat yang dapat dihimpun melalui program pensiun, asuransi, dan reksa dana. Keterbatasan pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi di pasar uang jangka pendek yang masih dangkal dan belum berkembang. Di pasar uang rupiah misalnya, transaksi *repurchase agreement* (repo) antar pelaku pasar masih belum berjalan dengan efisien. *Repo rate* yang lebih tinggi dari suku bunga *uncollateralized loan* mendorong semakin lambatnya

perkembangan transaksi dimaksud.⁴ Oleh karena itu, kebijakan struktural untuk mendalamkan pasar keuangan, termasuk membangun pasar repo, diharapkan dapat membantu mendorong perkembangan di pasar modal dan memperkuat struktur pembiayaan perekonomian jangka panjang.

(iv) Peran Ekonomi Inklusif

Tantangan selanjutnya adalah masih kuatnya permasalahan ketidakmerataan akses pada kesempatan dan peluang ekonomi bagi masyarakat luas sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Walaupun secara agregat jumlah orang miskin dan tingkat kemiskinan di Indonesia masih dalam tren menurun, namun tren penurunan tersebut masih lambat dan belum dapat mengurangi ketimpangan akses pada kesempatan dan peluang ekonomi terutama pada masyarakat berpendapatan rendah.

Sementara itu, kondisi pembangunan manusia menunjukkan bahwa secara umum akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih belum merata antar berbagai wilayah di Indonesia. Hal yang sama terjadi pula dengan akses ke infrastruktur dasar bagi peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Pada sektor keuangan, inklusi keuangan juga belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama layanan bagi masyarakat pada tingkat pendapatan paling bawah. Kondisi saat ini juga menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal dan akses ke layanan perbankan masih belum merata.

(v) Kualitas Modal Dasar Pembangunan

Berdasarkan uraian diatas, berbagai keterbatasan di sisi produksi terutama di sektor industri, tidak terlepas dari belum memadainya ketersediaan modal dasar pembangunan yang merupakan input bagi peningkatan kehandalan dan kapasitas perekonomian pada umumnya, dan sektor industri pada khususnya. Modal-modal dasar tersebut adalah: (a) infrastruktur konektivitas, baik fisik maupun digital yang memadai, berkualitas dan efisien, (b) iklim usaha, fasilitasi perdagangan dan institusi yang kondusif, dan (c) modal sumber daya manusia (*human capital*) yang handal dan berdaya saing global, yang semuanya merupakan pra syarat input pendukung (*enablers*) bagi bertumbuh-kembangnya industri-industri bernilai tambah tinggi berbasis teknologi dan inovasi.

⁴ Transaksi repo, yang tergolong dalam *collateralized loan*, volumenya hanya sekitar Rp820 miliar per hari, di 2014, jauh lebih rendah dari transaksi PUAB yang *uncollateralized* yang rata-rata hariannya sebesar Rp11,1 triliun.

a. *Infrastruktur konektivitas*

Kualitas dan ketersediaan infrastruktur konektivitas fisik dan digital di Indonesia relatif masih tertinggal, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah efisiensi di sisi telekomunikasi dan logistik di Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan, sehingga keseluruhan daya saing perekonomian Indonesia dapat tertinggal.

Tabel 1.3. Perbandingan Kualitas Infrastruktur

Negara	Global Competitiveness Index (GCI)	Total Infrastruktur	Jalan	Rel Kereta Api	Pelabuhan	Udara	Listrik	Internet & Fixed Broadband/100 populasi
China	5	5	5	5	5	5	5	14
Hong Kong	5	7	6	6	6	7	7	31
India	4	4	4	4	4	4	4	1
Indonesia	5	4	4	4	4	4	4	1
Korea	5	6	6	6	5	5	6	39
Malaysia	5	6	6	5	6	6	6	10
Filipina	4	3	3	2	3	4	4	23
Singapura	6	6	6	6	7	7	7	28
Sri Lanka	4	4	5	4	4	5	5	3
Thailand	5	5	4	2	4	5	5	8
Vietnam	4	4	3	3	4	4	4	6
Skala	1	2	3	4	5	6	7	

Keterangan: Skala 1-7 (semakin tinggi semakin baik); kecuali untuk internet & fixed broadband/100 populasi

Sumber: World Economic Forum, 2015

Dari sisi konektivitas fisik, ketersediaan konektivitas yang memadai, seperti konektivitas darat yang murah dan efisien, khususnya jaringan perkeretaapian, yang terpadu dengan konektivitas maritim yang terintegrasi di seluruh Nusantara sangat dibutuhkan untuk memperkuat integrasi internal perekonomian Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Saat ini, terdapat indikasi bahwa integrasi internal tersebut belum sepenuhnya optimal. Konektivitas antar pulau yang efisien sangat diperlukan untuk memperkuat mobilitas barang dan jasa serta input-input faktor produksi, seperti modal manusia dan kapital fisik, supaya integrasi internal tersebut dapat lebih optimal dan konvergensi produktivitas antar berbagai wilayah perekonomian dapat lebih cepat.

Sementara itu, dari sisi konektivitas digital, pembangunan sektor telekomunikasi saat ini masih terfokus di Pulau Jawa, baik dari sisi penetrasi jaringan optik, layanan internet, serta modernisasi BTS ke teknologi 3G. Pengembangan penyediaan layanan pita lebar di Indonesia belum menjadi prioritas nasional, sementara tantangan yang dihadapi adalah persoalan membangun suatu ekosistem industri telekomunikasi dimana kesiapan infrastruktur, teknologi, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Untuk mengejar ketertinggalan

Indonesia dalam membangun layanan pita lebar diperlukan pendekatan secara holistik melalui pencanangan berbagai program, diantaranya: penyediaan akses pita lebar bagi semua kota dan provinsi, layanan publik yang berbasis elektronik. Penyediaan layanan pita lebar yang merata dan berkesinambungan perlu ditunjang oleh iklim penyelenggaraan yang mendukung.

b. Fasilitasi perdagangan, iklim usaha dan institusi

Fasilitasi perdagangan menjadi agenda prioritas berbagai negara, termasuk Indonesia dan juga para pelaku usaha, baik PMA maupun PMDN. Pentingnya fasilitasi perdagangan sebenarnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi itu sendiri. Setelah berbagai usaha ditempuh untuk terus mengurangi atau bahkan menghilangkan *tariff dan non-tariff barrier* di seluruh negara, termasuk di Indonesia, potensi peningkatan volume dan nilai perdagangan dirasa masih jauh dari potensialnya. Hasil empiris menunjukkan efektivitas fasilitasi perdagangan jauh lebih besar dibanding hanya dengan menurunkan tarif. Penurunan setengah dari biaya fasilitasi perdagangan diindikasikan dapat memberikan manfaat sepuluh kali lebih besar dibanding menurunkan tarif, apalagi untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan besaran tarif perdagangan, khususnya ekspor yang tergolong sangat kompetitif di dunia, Indonesia sudah seharusnya dapat meningkatkan penetrasi ekspor berbagai jenis barang di sepanjang rantai pasokan dunia dengan perbaikan pada fasilitasi perdagangannya. Berdasarkan survei tingkat kemudahan berusaha dari *International Finance Corporation* (IFC), kemudahan berusaha Indonesia masih berada pada peringkat ke-120 dari 189 negara yang disurvei. Beberapa perbaikan yang masih diperlukan antara lain penegakan kontrak bisnis, penyelesaian sengketa bisnis, kemudahan memulai bisnis baru, dan dukungan sistem perpajakan (Tabel 1.4).

Tabel 1.4. Indikator Kemudahan Berusaha

Negara	Peringkat Komposit	Kemudahan Memulai Bisnis Baru	Izin Aktivitas Konstruksi	Akses Listrik	Pendaftaran Properti Dagang	Kemudahan Mendapatkan Kredit	Perlindungan Investor	Intensitas Pembayaran Pajak	Kemudahan Perdagangan Antar Negara	Penegakan Hukum Kontrak Bisnis	Penyelesaian Sengketa Bisnis
Indonesia (2015)	109	24	17	7	17	10	9	24	16	21	8
Indonesia (2014)	120	175	88	121	101	86	52	132	54	147	144
Malaysia	18	3	5	5	3	4	3	5	3	5	4
China	84	15	24	14	4	13	17	23	13	2	7
Filipina	103	22	15	6	14	20	20	20	12	18	6
Kamboja	127	25	25	22	16	1	12	14	14	22	9

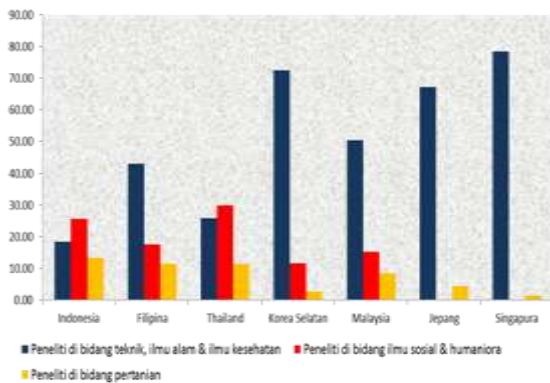
Keterangan: semakin rendah data, semakin baik

Sumber: IFC

c. *Kualitas sumber daya manusia*

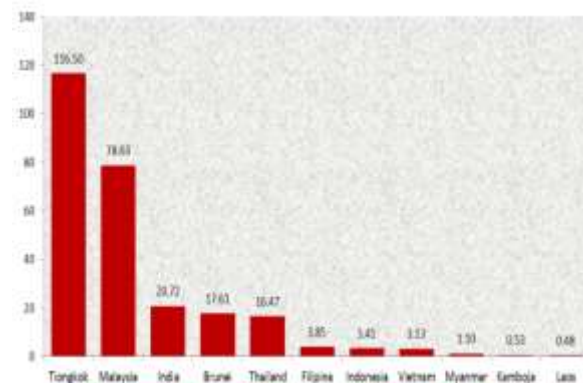
Ketersediaan modal manusia sebagai salah satu input produksi secara memadai merupakan kondisi cukup bagi aktivitas ekonomi yang produktif. Sebagai daya kreatif, modal manusia adalah sumber inovasi baik terkait produk maupun proses, mengingat inovasi merupakan sumber pertumbuhan output. Dalam konteks negara berpendapatan menengah, ketersediaan modal manusia dan pekerja riset yang terampil, handal dan berpendidikan tinggi, khususnya di bidang matematika, sains, teknologi, dan kesehatan, adalah pra syarat bagi transisi yang lebih cepat ke negara maju. Terkait ini, kondisi Indonesia tampaknya masih perlu mendapat perhatian, mengingat belum memadainya ketersediaan daya kreatif tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara *peer* pesaing, misalnya di ASEAN (Grafik 1.12). Masih belum memadainya jumlah pekerja riset di bidang sains dan teknologi di Indonesia berdampak pada masih rendahnya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah, jika dibandingkan dengan negara-negara *peer* pesaing di Asia (Grafik 1.13).

Grafik 1.12. Perbandingan Ketersediaan Peneliti Berdasarkan Bidang Keilmuan Antar Negara



Sumber: UNESCO (2011), diolah

Grafik 1.13. Perbandingan Belanja Kotor Penelitian dan Pengembangan (R&D) Per Kapita Per Negara



Sumber: UNESCO (2011), diolah

Kurang memadainya pasokan modal manusia diatas juga mengindikasikan adanya tantangan terkait dengan tingkat produktivitas pekerja dan kapasitas absorpsi teknologi dalam perekonomian yang masih lemah. Tingkat produktivitas dan kapasitas absorpsi teknologi yang lemah tersebut pada gilirannya berpotensi memperlambat proses peningkatan kehandalan industri dan transisi Indonesia dari negara tujuan ekspor menjadi negara pemasok dalam rantai produksi global barang

berteknologi. Ini berarti pula bahwa proses peningkatan pendapatan per kapita, laju pengentasan kemiskinan dan perbaikan tingkat ketimpangan ekonomi akan berjalan lambat. Terkait dengan hal ini, fakta sederhana menunjukkan adanya hubungan positif antara ketersediaan modal manusia terampil yang memadai dengan kapasitas inovasi dan peningkatan pendapatan per kapita, khususnya pada bidang matematika, sains, teknologi, dan kesehatan. Sementara itu, untuk kasus Indonesia studi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas modal manusia merupakan kunci transisi ke negara maju, dan penurunan tingkat kemiskinan serta tingkat ketimpangan.

Elemen Kontinuitas: Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan

Dalam upaya mempercepat reformasi struktural terdapat pra syarat paling mendasar yang perlu dipenuhi, yaitu stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas moneter dan sistem keuangan. Tanpa kedua pra syarat mendasar ini perencanaan dan implementasi program pembangunan akan sulit dilakukan, bahkan dalam kondisi makro dan sistem keuangan yang tidak stabil, pencapaian pembangunan yang ada akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa stabilitas moneter dan sistem keuangan adalah elemen-elemen kontinuitas (*elements of continuity*) proses pembangunan nasional. Terkait dengan kedua elemen kontinuitas ini, masih terdapat tantangan-tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah dicapai. Dari sisi pencapaian stabilitas moneter, tantangan ke depan adalah terus mengupayakan laju inflasi dan ekspektasinya pada level yang rendah, serta menjaga stabilitas nilai tukar yang sesuai dengan fundamental perekonomian. Sementara itu, dari sisi pencapaian stabilitas sistem keuangan adalah perlunya terus memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap gejolak perekonomian global.

Inflasi dan ekspektasinya dapat dikatakan telah terjangkau dengan baik ketika kenaikan harga-harga dalam perekonomian dari waktu ke waktu rendah dan stabil. Inflasi yang demikian merupakan pra syarat paling mendasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sudut pandang ekonomi makro, laju inflasi yang tinggi dan bergejolak dapat menyebabkan harga produk-produk ekspor Indonesia di pasar dunia menjadi kehilangan daya saingnya. Sementara itu, tingginya laju inflasi berarti pula bahwa harga domestik terus meningkat, sehingga dapat berakibat pada tingginya permintaan impor untuk substitusi. Proses ini pada gilirannya dapat menyebabkan kinerja neraca transaksi berjalan yang memburuk dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Dalam kondisi inflasi yang tinggi, ketimpangan pendapatan dapat meningkat. Pekerja di sektor formal yang menerima upah atau gaji tetap dapat merespons kenaikan harga-harga secara lebih baik melalui renegotiasi upah atau gaji. Di sisi lain, para pekerja dengan sistem pengupahan yang lebih longgar, belum tentu dapat merespons kenaikan harga-harga tersebut. Hal ini

menyebabkan munculnya kesenjangan pendapatan yang melebar. Dalam kaitan ini pula, dengan upah formal yang terus meningkat akibat inflasi, proses industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja di perkotaan dapat tertahan. Laju kenaikan upah nominal juga menjadi sulit untuk diprediksi, sementara minat investasi pelaku usaha serta daya beli konsumen dan kelompok pekerja terus tergerus. Kombinasi ini selanjutnya dapat mengganggu keharmonisan hubungan industrial dan pada gilirannya dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas nilai tukar dan pergerakan nilai tukar juga perlu dijaga mengingat dalam perekonomian kecil yang terbuka (*small-open economy*) dan pasar keuangan yang masih dangkal seperti Indonesia, pergerakan nilai tukar seringkali mengalami fluktuasi yang berlebihan dan tidak sejalan dengan kondisi fundamentalnya sehingga mengganggu pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Oleh karenanya, kestabilan nilai tukar menjadi bagian yang sangat penting dari upaya untuk tercapainya kestabilan harga, serta untuk mendukung terpeliharanya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Sementara itu, upaya untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga stabilitas moneter. Perekonomian Indonesia yang terbuka dan sektor keuangan yang terintegrasi dengan pasar keuangan dunia telah meningkatkan aktivitas perdagangan dan pembiayaan pembangunan melalui aliran modal. Namun demikian, dengan integrasi tersebut, gejala dan krisis ekonomi yang terjadi di negara lain akan dengan cepat terasa dampaknya ke Indonesia baik melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan. Sementara itu, gejala dan krisis dalam perekonomian dunia adalah sebuah fenomena yang kerap berulang. Sistem keuangan yang rentan terhadap gejala eksternal berpotensi memperbesar dampak negatif gejala (*shock amplifier*) pada perekonomian dan pada gilirannya mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperkuat fondasi sistem keuangan agar berdaya tahan sehingga dapat secara optimal menjadi pendukung (*buffer*) pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

III. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Konsep dan Pemikiran

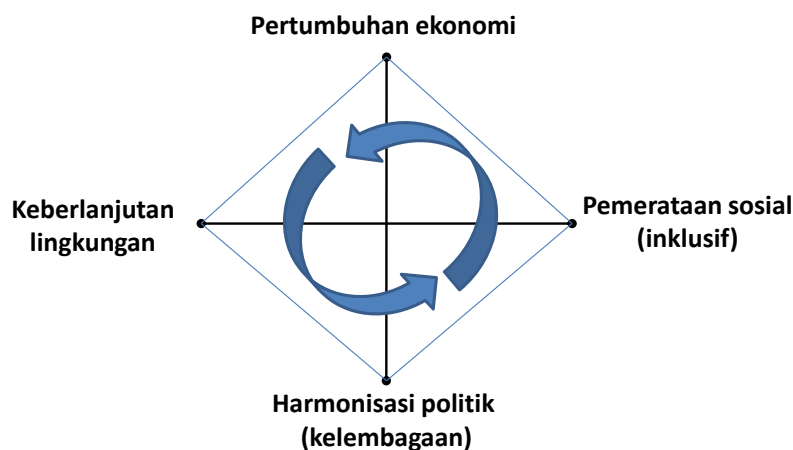
Dimensi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Ekonomi dunia saat ini sedang memasuki periode atau abad baru (Abad Milenium III), dimana gravitasi dari pusat kegiatan ekonomi dunia menuju kepada kekuatan baru, yaitu Asia; dan oleh karenanya abad ini disebut juga Abad Asia (*Asia Century*). ADB dalam studinya, "*Asia 2050: Realizing*

the Asian Century” (ADB, 2011), menyampaikan dua skenario kemungkinan mengenai prospek ekonomi Asia dalam 40 tahun ke depan, yaitu skenario optimis dan skenario pesimis dengan adanya *middle income trap*. Dalam skenario pertama (*Asian century scenario*), diperkirakan kontribusi Asia pada PDB dunia akan mencapai setengahnya, sementara dalam skenario *middle income trap* Asia akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang moderat sehingga kontribusinya pada PDB global hanya mencapai 30%. Perkembangan tersebut paralel dengan peningkatan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk Asia yang mengalami peningkatan kemakmuran.

Dengan kedua skenario tersebut, tantangan pembangunan ekonomi ke depan akan semakin berat dan keberhasilan transisi menuju Abad Asia memerlukan paradigma pembangunan yang berkelanjutan yang baru. Terkait dengan hal tersebut, beberapa pemikiran menekankan bahwa dimensi pembangunan tidak hanya menyangkut pencapaian kesejahteraan/pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan sosial, namun perlu juga dikaitkan dengan harmonisasi politik/ kelembagaan. Keempat dimensi tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain.⁵

Grafik 1.14. Dimensi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan



Terkait dengan empat dimensi tersebut maka beberapa tantangan pembangunan ke depan yang perlu diantisipasi adalah bagaimana merumuskan strategi kebijakan yang tepat dan terkoordinasi untuk: (i) menyeimbangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (*rebalance source of growth*); (ii) mencapai pembangunan yang menjaga keberlanjutan lingkungan (*environmentally*

⁵ Dalam beberapa laporan, terutama yang banyak publikasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama yang saling bergantung dan memperkuat, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Emil Salim (1990), pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

sustainable); (iii) mencapai pembangunan yang inklusif (*socially inclusive*); dan (iv) mendukung harmonisasi dalam proses pembangunan kawasan (*politically harmonious*).

Untuk itu, otoritas kebijakan di berbagai negara dituntut untuk semakin serius dalam perwujudan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang mengacu pada empat dimensi tersebut. Dalam skala nasional, strategi kebijakan perlu diarahkan antara lain untuk: (i) mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif; (ii) mewujudkan sistem keuangan yang stabil; (iii) mengurangi intensitas pemanfaatan energi dan sumber daya alam; (iv) mendukung kewirausahaan, inovasi dan pengembangan teknologi; dan (v) memperbaiki tata kelola dan struktur kelembagaan. Sementara itu, dalam skala regional, beberapa studi menunjukkan pentingnya penguatan kerjasama regional untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kesiapan terhadap bencana dan permasalahan energi, serta perlindungan terhadap kepentingan publik (Kawai, 2012).

Dengan landasan pemikiran tersebut, koordinasi kebijakan antar otoritas kebijakan lain menjadi sangat penting. Hal tersebut dapat dilakukan dalam empat dimensi pembangunan yang berkelanjutan, antara lain sebagai berikut (Juhro, 2013).

- (i) Kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan permintaan domestik (dan regional). Untuk mendukung pengelolaan keseimbangan internal dan eksternal, kebijakan ini harus diselaraskan dengan strategi utama dalam memperkuat struktur perekonomian.
- (ii) Kebijakan untuk menghapuskan/mengurangi subsidi energi/bahan bakar sebagai sinyal pengurangan konsumsi bahan bakar fosil. Kebijakan ini perlu disertai dengan program pemberian subsidi khusus kepada masyarakat golongan miskin. Terkait dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan adalah kebijakan sektoral untuk mendorong respons sisi penawaran, termasuk di bidang industri energi, transportasi, pertanian, dan ketahanan pangan.
- (iii) Kebijakan ekonomi inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesempatan berusaha, termasuk diantaranya melalui peningkatan akses pada kredit dan sumber pembiayaan lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (iv) Penguatan kerjasama antar negara di kawasan regional dan internasional, yang menjamin keharmonisan hubungan, meminimalisir potensi konflik, dan menciptakan fondasi politik untuk tercapainya keamanan dan kedamaian kawasan.

Strategi Pembangunan EKonomi: *Export-Led vs. Domestic Demand-Led*

Pada periode sebelum krisis keuangan global tahun 2008/09, strategi pertumbuhan ekonomi global lebih didominasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh perkembangan ekspor (*export-led growth*). Paradigma tersebut muncul sebagai bagian dari konsensus bersama diantara para ekonom dunia untuk meraih keuntungan dari keterbukaan ekonomi (*Washington Consensus*). Krisis keuangan global 2008/09 telah mendorong pelemahan permintaan global secara dalam dan berkepanjangan. Perkembangan ekonomi global setelah periode krisis keuangan global 2008/09 tersebut telah mendorong mengemukanya paradigma mengenai strategi mengelola pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh permintaan domestik (*domestic demand-led growth*).

Sebagaimana dikemukakan oleh Palley (2011), negara berkembang perlu untuk mendorong ekspor. Namun demikian, sistem perdagangan internasional tidak boleh semata-mata demi kepentingan keunggulan kompetitif, tetapi juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam hal ini, pertumbuhan permintaan domestik harus didasarkan pada empat pilar, yaitu: (1) peningkatan pemerataan pendapatan; (2) tata kelola yang baik; (3) stabilitas sistem keuangan; dan (4) pemberian pembiayaan pembangunan yang cukup adil. Adapun kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh untuk meletakkan pilar-pilar tersebut antara lain: (1) demokrasi dan hak buruh; (2) reformasi keuangan; (3) kombinasi yang tepat antara penghapusan utang, peningkatan bantuan luar negeri, dan peningkatan bantuan pembangunan.

Berdasarkan pengalaman negara *emerging markets*, diyakini bahwa sangat sulit untuk mengetahui sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial/sesungguhnya. Bukti empiris di beberapa negara Asia juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berhasil dan berkelanjutan memerlukan dukungan baik dari permintaan domestik yang kuat maupun *net* ekspor (Felipe dan Lim, 2005). Dalam kaitannya dengan fakta tersebut, dipercaya bahwa strategi pembangunan ekonomi tidak dapat mengabaikan strategi ekspor, dan hal tersebut harus diikuti dengan penguatan sisi permintaan domestik. Lebih lanjut, konfigurasi kebijakan perlu diarahkan untuk menjawab permasalahan ketidakseimbangan internal dan eksternal. Dari perspektif kebijakan bank sentral, hal tersebut dilakukan melalui integrasi kerangka kebijakan stabilitas moneter dan sistem keuangan (Juhro, 2012).

Bagan 1.1. Integrasi SM dan SSK dalam Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan



Sumber: Palley (2011) dan Juhro (2012)

Kunci Negara Sukses: Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Politik yang Inklusif

Pengembangan *Theory of Inclusive Institution* sedang digagas oleh Acemoglu and Robinson (2012). Acemoglu and Robinson dalam studinya terhadap sekitar 70 negara di dunia dalam rentang studi 1000 tahun menyimpulkan bahwa bukan kebudayaan, iklim, geografi, tingkat kepatuhan pada kebijakan yang benar atau agama yang menentukan sukses atau gagal nya suatu negara. Sukses atau gagal nya suatu negara ditentukan oleh baik atau tidaknya pengelolaan kelembagaan ekonomi dan politik. Tesis utama Acemoglu and Robinson menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat besar kemungkinannya untuk terjadi dalam negara dengan kelembagaan yang inklusif, dibanding kelembagaan yang ekstraktif.

Dalam kaitan ini, terdapat empat kondisi kelembagaan yang tercipta sesuai dengan pilihan masyarakat, yaitu:

- (i) Kelembagaan ekonomi ekstraktif (*extractive economic institutions*). Kondisi dengan tatanan aturan dan hukum yang lemah, tidak adanya jaminan terhadap hak cipta, adanya kendala atau aturan yang menyebabkan tidak berfungsinya pasar dan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif.
- (ii) Kelembagaan politik ekstraktif (*extractive political institutions*). Kondisi yang mendekati batas *absolutism*, yaitu dimana kelembagaan politik mendorong kekuasaan terkonsentrasi pada beberapa orang/group tanpa mekanisme aturan main yang baik dan *checks and balances*.
- (iii) Kelembagaan ekonomi inklusif (*inclusive economic institutions*). Kondisi dimana terjaminnya hak cipta, aturan dan hukum, dukungan pemerintah (pelayanan publik dan regulasi) untuk kegiatan

pasar, keterbukaan pada kegiatan baru, serta akses yang tinggi pada pendidikan dan kesempatan maju bagi masyarakat luas.

- (iv) Kelembagaan politik ekstraktif (*inclusive political institutions*). Kondisi dimana kelembagaan politik memungkinkan pluralism dan partisipasi luas dari masyarakat, memberikan aturan dan *check and balances* pada politisi. Selain itu, pada tingkatan tertentu terdapat sentralisasi politik kepada negara untuk dapat menegakkan aturan dan hukum secara kolektif.

Acemoglu and Robinson menyatakan bahwa terdapat sinergi kuat antara kelembagaan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, sinergi kelembagaan yang inklusif (ekonomi dan politik) akan menciptakan kekuatan (*virtuous cycle*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui:

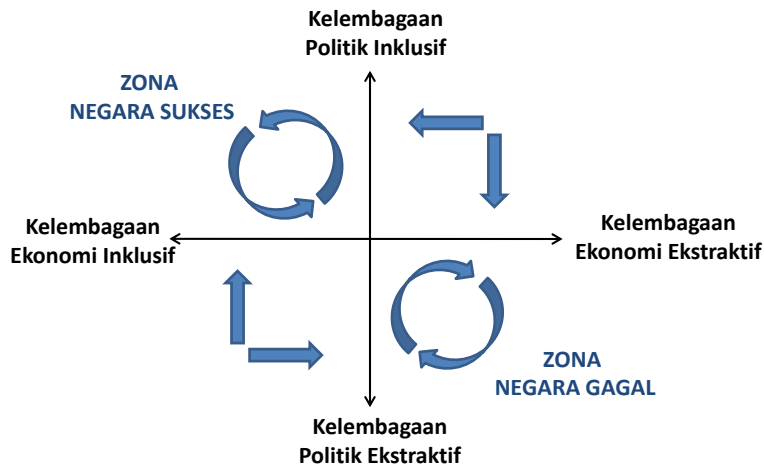
- (i) mendorong kegiatan investasi dan inovasi, karena adanya perlindungan hak cipta;
- (ii) mendorong bekerjanya pasar dengan baik, yaitu alokasi sumber daya yang lebih baik, masuknya perusahaan yang lebih efisien, kemampuan pembiayaan untuk mendukung usaha baru;
- (iii) menciptakan partisipasi luas masyarakat dalam kegiatan pembangunan, antara lain di bidang pendidikan dan kegiatan usaha.

Dengan penyebaran kekuatan yang lebih luas, kelembagaan inklusif cenderung menempatkan kelembagaan ekonomi yang menyelaraskan pemanfaatan potensi sumber daya secara luas, menghilangkan kendala berusaha (*entry barriers*), dan mendorong kecenderungan bekerjanya pasar yang dapat memberikan keuntungan secara luas.

Sebaliknya, kelembagaan politik ekstraktif mengkonsentrasikan kekuasaan pada sekelompok elit dan cenderung memberikan keleluasaan pada penguasa. Demikian pula, Kelembagaan ekonomi ekstraktif didominasi oleh sekelompok elit yang cenderung mengeksploitasi sumber daya menjauh dari kepentingan publik. Dengan demikian, secara alami, kedua kelembagaan ekstraktif tersebut akan berkolaborasi untuk menjamin kelangsungan kegiatannya yang dapat mendistorsi kepentingan masyarakat luas.

Sinergi antara kelembagaan ekonomi dan politik yang ekstraktif juga akan menciptakan *feedback loop* (*vicious cycle*) yang kuat. Dalam hal ini, kelembagaan politik memungkinkan para elit mengontrol kekuasaan untuk mengatur/memilih kelembagaan ekonomi yang memiliki kemampuan dan potensi oposisi relatif terbatas. Mereka juga mampu mengatur pergeseran/perubahan struktur kelembagaan politik. Sebaliknya, kelembagaan ekonomi ekstraktif cenderung memperkaya sesama elit, serta kekayaan dan kekuatannya memungkinkan mereka untuk mengkonsolidasikan dominasi politik.

Bagan 1.2. Keterkaitan Kelembagaan Ekonomi dan Politik



Sebagaimana kasus yang terjadi di beberapa negara, kombinasi kelembagaan ekstraktif dan kelembagaan inklusif umumnya tidak stabil dan tidak akan berkelanjutan. Walaupun sangat besar kemungkinan terjadi dalam kelembagaan inklusif, pertumbuhan ekonomi mungkin saja terjadi dalam kelembagaan ekstraktif. Hal ini karena adanya kemampuan untuk menggali sumber daya dan menciptakan output. Kelembagaan ekonomi ekstraktif dapat mengalokasikan sumber daya pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai produktivitas tinggi yang dikendalikan oleh kelompok elit yang mempunyai kedudukan penting/aman (kasus Uni Sovyet, Barbados), serta memberikan ruang bagi tumbuhnya kelembagaan ekonomi yang relatif inklusif dalam kendali mereka (kasus Korea Selatan di bawah pimpinan Jenderal Park, China saat ini). Perbedaan besar dengan capaian pertumbuhan ekonomi dalam kelembagaan inklusif adalah tidak adanya *creative destruction* dalam dinamika ekonomi (kegiatan investasi). Dengan demikian, walaupun dalam kombinasi kelembagaan ekstraktif dan kelembagaan inklusif dimungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kondisi tersebut tidak akan berkelanjutan.

IV. Strategi Kebijakan untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

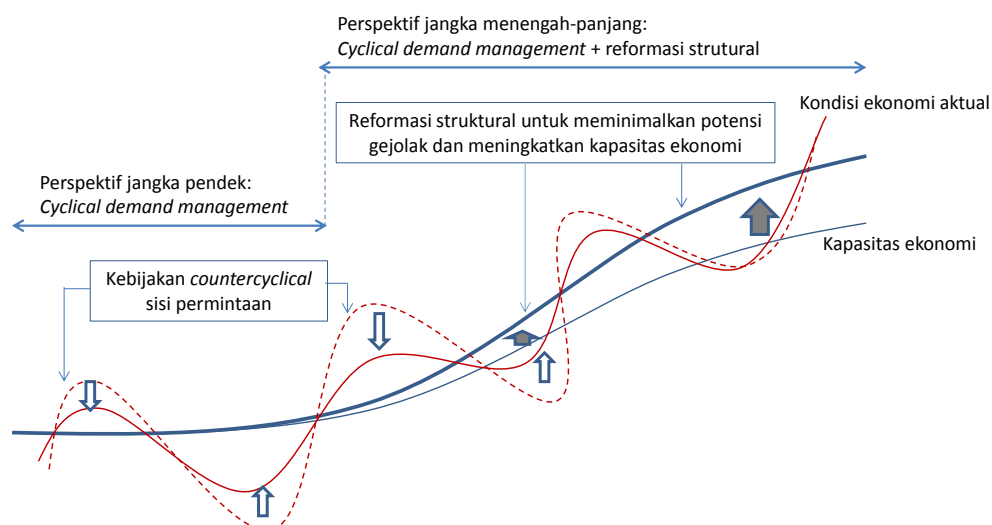
Dengan berbagai tantangan perekonomian sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperlukan rumusan strategi kebijakan yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

- (i) *Pertama*, strategi kebijakan harus dapat menyelaraskan beberapa kepentingan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi secara seimbang, menjaga keberlanjutan

lingkungan; termasuk energi dan pangan, mendorong kegiatan ekonomi yang inklusif, serta mendukung penguatan kelembagaan.

- (ii) *Kedua*, strategi kebijakan harus menjawab dimensi permasalahan ketidakseimbangan di sisi internal dan eksternal. Kompleksitas permasalahan terkait mensyaratkan perlunya koordinasi (bauran) kebijakan moneter, sistem keuangan, dan ekonomi makro.
- (iii) *Ketiga*, implementasi strategi kebijakan tersebut mencakup perspektif jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Dalam perspektif jangka pendek, strategi kebijakan harus diarahkan untuk mengelola siklus ekonomi dari sisi permintaan melalui kebijakan *countercyclical* dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro (misalnya moneter dan kebijakan makroprudensial). Sementara itu, dalam perspektif jangka menengah-panjang, strategi kebijakan juga harus diarahkan untuk meminimalkan potensi gejolak ekonomi yang mungkin timbul serta sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui percepatan reformasi struktural, baik di sektor riil maupun keuangan.

Grafik 1.15. Strategi Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan



Sumber: Juhro (2015)

Kebijakan *Countercyclical*: Integrasi Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan merupakan elemen kontinuitas yang sangat penting dalam mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan. Dinamika yang terjadi dalam krisis keuangan global 2008/09 menunjukkan bahwa kebijakan moneter semakin perlu diarahkan untuk mengantisipasi risiko

instabilitas makroekonomi yang bersumber dari sistem keuangan. Hal tersebut mempunyai implikasi bahwa manajemen ekonomi makro yang sehat harus juga memperhitungkan stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi perwujudan lingkungan ekonomi makro yang berkelanjutan. Dengan perspektif kebijakan tersebut, untuk memperkuat kerangka stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, bank sentral dituntut untuk lebih kreatif dalam merespon ketidakpastian yang muncul dalam perekonomian dan berada di luar keyakinan umum (*beyond conventional wisdom*). Dalam hal ini, formulasi kebijakan bank sentral harus mempertimbangkan peran strategis kebijakan moneter dan sistem keuangan secara bersama-sama.⁶

Secara *de facto*, strategi bauran kebijakan dalam cakupan lebih luas, tidak hanya moneter dan makroprudensial, sudah mulai diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk mengawal stabilitas makroekonomi pasca krisis keuangan global 2008/09. Penerapan strategi bauran kebijakan merupakan bentuk korektif dan respon strategis dari berbagai perubahan struktural dan tantangan lingkungan ekonomi pasca-krisis, dimana bank sentral dituntut untuk memiliki peranan yang lebih holistik yang tidak hanya terbatas pada kestabilan harga di pasar barang semata, namun juga kestabilan sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia dituntut untuk lebih luwes dalam mengantisipasi berbagai perubahan dan profil risiko yang terbentuk yang dapat mengganggu keseimbangan internal dan eksternal. Penerapan strategi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen yang tersedia secara terukur, baik dari aspek takaran (*magnitude*) dan waktu (*timing and sequencing*).

Dalam perspektif pengelolaan keseimbangan internal dan eksternal tersebut, Bank Indonesia cukup berhasil dalam menerapkan strategi bauran kebijakan, baik melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar dan makroprudensial. Sebagai gambaran umum, lingkup strategi bauran kebijakan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

⁶ Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperkuat kerangka stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan diperlukan integrasi atau sinergi kebijakan moneter dan makroprudensial; dan juga dengan kebijakan ekonomi *countercyclical* lain, secara tepat. Sebagaimana diketahui, tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral biasanya menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Namun, menjaga stabilitas harga tidaklah cukup untuk menjamin tercapainya stabilitas makroekonomi, karena sistem keuangan yang berperilaku prosiklikal menyebabkan fluktuasi perekonomian yang berlebihan. Sementara itu, tujuan dari kebijakan makroprudensial adalah untuk menjamin daya tahan sistem keuangan secara keseluruhan dalam rangka mendukung jasa intermediasi keuangan kepada perekonomian secara keseluruhan. Dengan peran *countercyclical* yang dimiliki, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output.

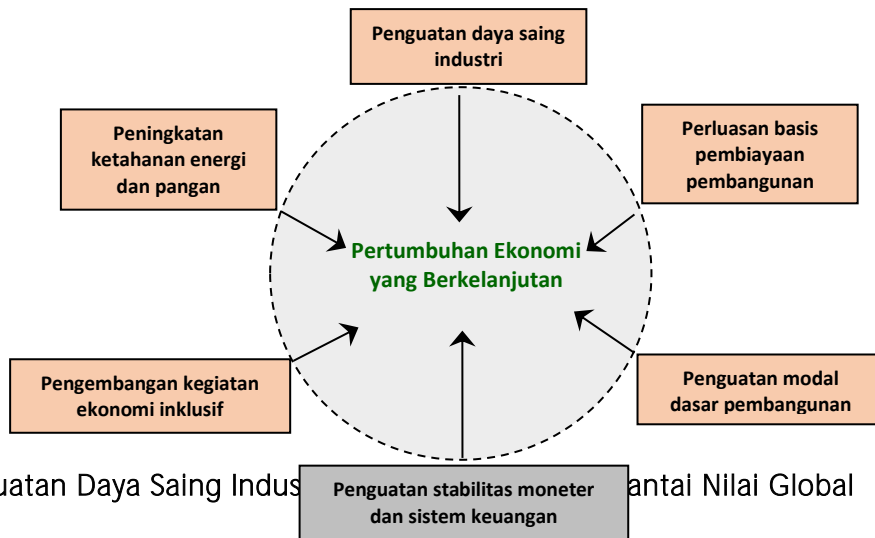
- *Pertama*, penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) untuk memberikan sinyal terhadap komitmen dan upaya Bank Indonesia dalam pencapaian sasaran inflasi ke depan. Hal ini juga didukung dengan penguatan operasi moneter untuk mendukung transmisi kebijakan moneter.
- *Kedua*, pengelolaan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental perekonomian. Langkah ini juga diselaraskan dengan optimalisasi pengelolaan cadangan devisa pada level yang memberikan *self assurance* terhadap potensi risiko *capital reversal* yang mengganggu stabilitas makroekonomi.
- *Ketiga*, penerapan kebijakan makroprudensial, baik untuk pengelolaan likuiditas sesuai dengan kebutuhan perekonomian, maupun pengelolaan dinamika arus modal asing dalam rangka memitigasi risiko *capital reversal* dan mendukung pendalaman keuangan.
- *Keempat*, penguatan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan stabilitas sistem keuangan serta dalam penguatan kebijakan struktural.
- *Kelima*, memperkuat strategi komunikasi untuk mengelola persepsi publik terhadap prospek perekonomian ke depan.

Perlu dicatat bahwa efektivitas penerapan strategi bauran kebijakan tersebut sangat tergantung pada karakteristik dari tantangan yang dihadapi oleh perekonomian. Dengan demikian, respon kebijakan Bank Indonesia bergerak secara dinamis menyesuaikan terhadap pergeseran tantangan dan risiko yang dihadapi. Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, bauran kebijakan yang tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi tersebut diyakini akan kondusif bagi upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia juga akan memastikan keseluruhan kerangka kebijakan makroekonomi memiliki koherensi dan merefleksikan kualitas pengelolaan ekonomi makro yang paripurna. Kualitas tersebut merupakan prasyarat paling mendasar bagi munculnya optimisme terhadap prospek perekonomian ke depan.

Reformasi Struktural

Berbagai tantangan struktural yang dapat membatasi ruang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan proses transisi Indonesia ke negara maju, berimplikasi pada mendesaknya implementasi kebijakan reformasi struktural yang kuat dan konsisten. Dengan dukungan kebijakan *countercyclical* untuk mengelola stabilitas moneter dan system keuangan, keseluruhan upaya reformasi struktural tersebut perlu diletakkan dalam konteks penguatan daya saing perekonomian, khususnya sektor industri, perwujudan kemandirian ekonomi domestik terutama di bidang energi dan pangan, dan perluasan basis pembiayaan pembangunan, pengembangan kegiatan ekonomi inklusif, dan penguatan modal dasar pembangunan.

Bagan 1.3. Integrasi Reformasi Struktural untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan



(i) Penguatan Daya Saing Industri dan Rantai Nilai Global

Kebijakan untuk memperkuat daya saing sektor industri dalam reformasi struktural dapat diarahkan pada penguatan kemampuan beradaptasi dengan dan mengambil manfaat sebesar-sebesarnya dari globalisasi ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Indonesia dalam kolaborasi produksi di sepanjang rantai nilai global yang mencakup 80% dari total ekspor dunia, terutama untuk barang-barang ekspor hasil industri berteknologi menengah dan tinggi baik itu barang jadi maupun barang-barang antara. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan jika Indonesia ingin cepat bertransisi ke negara maju berpendapatan tinggi dan mengentaskan kemiskinan.

Untuk itu, industri-industri berteknologi menengah dan tinggi berorientasi ekspor perlu terus didukung, diperluas keragamannya dan diperkuat perannya dalam pembentukan nilai tambah domestik. Indonesia juga perlu terus memfasilitasi PMA yang berminat memproduksi barang antara dan/atau perakitan barang akhir untuk kemudian di ekspor kembali ke seluruh dunia. Dengan demikian, PMA berteknologi menengah dan tinggi yang melakukan *off shoring* ke Indonesia dan pemasok komponen-komponen dalam negeri yang berkolaborasi dengannya akan menjadi tulang punggung sektor industri Indonesia kedepan.

Melalui strategi diatas diharapkan proses peningkatan kapabilitas industrial (*industrial upgrading*) dapat terjadi lebih cepat, dimana transfer teknologi dan pengetahuan yang terjadi akan meningkatkan kehandalan dan kemampuan industri domestik dalam menyerap dan memanfaatkan teknologi. Selain itu, diharapkan pula dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan berkembangnya sektor-sektor jasa pendukung yang handal.

(ii) Peningkatan Ketahanan Energi dan Pangan

Upaya Pemerintah dalam mendorong reformasi energi, antara lain dengan mengurangi (menghapus) subsidi energi dan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan upaya strategis untuk mengatasi masalah kesinambungan fiskal. Dengan langkah kebijakan tersebut, porsi subsidi energi terhadap total belanja energi akan berkurang secara signifikan. Sehingga defisit fiskal pun dapat ditekan hingga mencapai level yang sehat.⁷

Selain langkah korektif Pemerintah dalam bentuk kebijakan penyesuaian harga energi bersubsidi, kedepan, kebijakan konversi dan diversifikasi energi mutlak terus diupayakan untuk memperkuat ketahanan energi. Kebijakan konversi merupakan kebijakan antara dalam menjalankan tujuan diversifikasi dan konservasi. Kebijakan konversi yang selama ini telah dijalankan Pemerintah seperti konversi minyak tanah ke gas untuk kebutuhan rumah tangga dan konversi BBM transportasi menjadi BBG perlu dituntaskan. Kebijakan diversifikasi perlu diarahkan pada percepatan peningkatan bauran energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Dalam kaitan ini pembangunan kapasitas pasokan energi alternatif seperti gas bumi, *coalbed methane*, gas serpih (*shale gas*), dan energi terbarukan seperti panas bumi, hidro, angin, dan solar, perlu dipercepat. Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah untuk penghematan penggunaan energi terutama terkait aktivitas transportasi dan logistik darat yang akan semakin membesar seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kelas menengah. Terkait ini pembangunan jaringan transportasi logistik yang hemat energi dengan daya angkut besar dan transportasi masal untuk penumpang yang nyaman, hemat energi dan terjangkau, seperti jaringan perkeretaapian perlu pula dipercepat.

Sementara itu, di sisi pangan, pengalaman empiris menunjukkan bahwa pengelolaan pangan tidak cukup hanya terbatas pada tataran ketahanan pangan, namun juga kemandirian pangan. Hal ini dikarenakan dengan masih tingginya ketergantungan pada impor, ketahanan pangan domestik menjadi semakin rentan terhadap gejolak faktor eksternal. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan selain tidak mengandalkan impor, juga harus bertumpu pada kemampuan produksi dalam negeri. Kebijakan-kebijakan jangka menengah-panjang yang dapat ditempuh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, antara lain adalah: (i) penataan lahan pertanian melalui pengendalian laju konversi lahan pertanian ke nonpertanian; (ii) pelaksanaan program-program intensifikasi pertanian pangan pokok secara lebih agresif guna mengimbangi

⁷ Sebagian dari penghematan ini didistribusikan Pemerintah dalam bentuk program-program kompensasi kenaikan harga yang terbagi dalam tiga tujuan yaitu peningkatan daya beli, pencegahan penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan infrastruktur agar kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga-harga tidak mengalami penurunan taraf hidup.

semakin menyusutnya lahan pertanian yang ada; dan (iii) peningkatan peran lanjutan pemerintah untuk mendorong terciptanya pasar komoditas pangan yang efisien.

(iii) Perluasan Basis Pembiayaan Pembangunan

Penguatan integrasi ke rantai nilai global dan keterbukaan terhadap *off shoring*, yang didukung oleh penguatan integrasi internal perekonomian Indonesia diharapkan berdampak pada meningkat pesatnya PMA dan kolaborasi global antara PMA dan PMDN untuk ekspor. Jika harapan ini terwujud maka basis pembiayaan pembangunan akan lebih kuat karena ditopang oleh pembiayaan PMA yang bersifat jangka panjang. Dalam kaitan ini, peran kebijakan fiskal Pemerintah sangat diharapkan. Kontribusi belanja modal dalam skim kerjasama Pemerintah dan swasta untuk penguatan infrastruktur dan kebijakan-kebijakan sosial akan berdampak positif pada integrasi internal Indonesia dan daya tarik Indonesia bagi *aktivitas off shoring* oleh produsen-produsen global. Selain itu peran kebijakan fiskal juga sangat diharapkan dalam mendorong pembangunan kemandirian pangan dan ketahanan energi. Untuk itu, optimalisasi ruang fiskal dapat dipertimbangkan, terutama dalam konteks penyediaan ruang fiskal yang lebih besar bagi pembangunan melalui realokasi subsidi BBM.

Sementara itu dari sisi pembiayaan kegiatan ekonomi melalui pasar keuangan, langkah-langkah pendalaman pasar keuangan untuk mendukung penguatan basis pembiayaan perekonomian perlu semakin diperkuat. Terkait ini, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat langkah-langkah pendalaman pasar keuangan yang selama ini telah dilakukan. Strategi pengembangan pasar keuangan diarahkan pada upaya mewujudkan pasar keuangan yang likuid dan efisien, dengan tetap mengedepankan aspek ketahanan (*resilient*) dan menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential*). Upaya pendalaman pasar keuangan ini pada dasarnya juga merupakan tanggung jawab bersama dari Bank Indonesia selaku otoritas pasar uang, Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pasar modal, Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal, pelaku pasar keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Karena mencakup lintas otoritas, untuk mencapai hasil yang diharapkan, strategi pengembangan pasar keuangan perlu ditempuh secara terkoordinasi.

(iv) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Inklusif

Terdapat sejumlah kebijakan yang perlu ditempuh untuk mewujudkan bangun perekonomian domestik yang lebih inklusif. Dalam kaitan ini, Pemerintah perlu terus meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan, akses kepada air minum dan sanitasi yang layak, akses kepada penerangan, dan kepemilikan akte kelahiran, untuk membuka akses bagi masyarakat kurang

mampu ke pelayanan dasar. Selain itu, Pemerintah juga perlu terus meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial untuk pekerja, baik formal maupun informal. Diharapkan dengan semakin terlindunginya pekerja informal dan teraksesnya pelayanan dasar seperti jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu maka produktivitas nasional dapat ditingkatkan.

Sementara itu, Bank Indonesia akan melengkapi dengan program keuangan inklusif, untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan. Dari sudut pandang Bank Indonesia, inklusivitas sistem keuangan akan secara langsung mendukung penguatan fondasi stabilitas sistem keuangan nasional, melalui diversifikasi risiko. Namun dari sudut pandang yang lebih luas, inklusi keuangan akan membuka akses bagi masyarakat miskin ke aktivitas ekonomi formal. Inklusi masyarakat pada tingkat pendapatan paling bawah ke dunia formal melalui inklusi keuangan selanjutnya akan membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan program-program intervensi sosial dan ekonomi yang lebih beragam dalam rangka meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat tersebut secara bertahap. Oleh karena itu, inklusi keuangan, di samping merupakan komponen penting dalam penguatan sistem keuangan, adalah juga sebuah perjalanan untuk memberdayakan masyarakat yang masih tertinggal.

Dalam mendorong inklusi keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas solusi layanan keuangan bagi masyarakat yang masih belum tersentuh oleh perbankan (*unbanked*). Penguatan tersebut dilakukan dengan mendorong bertumbuhkembangnya Layanan Keuangan Digital (LKD). Melalui LKD, masyarakat tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor cabang bank untuk mendapatkan layanan pembayaran dan keuangan. Masyarakat cukup mendatangi agen LKD (perpanjangan tangan bank), yang berada di sekitar tempat tinggal mereka (*social banking*). Data pengguna LKD juga akan dimanfaatkan menjadi salah satu basis data dari sistem informasi bagi UMKM, yang selanjutnya dapat menjadi sumber data bagi pemeringkatan kredit UMKM dalam upaya untuk meningkatkan akses kredit dan pengembangan UMKM.

(v) Penguatan Modal Dasar Pembangunan

Gagasan pembangunan Nusantara sebagai ekosistem industri berbasis inovasi dalam banyak aspeknya merupakan penguatan dari karakteristik dan pola keterkaitan ekonomi yang telah ada saat ini. Secara karakteristiknya, pertumbuhan ekonomi di Jawa banyak ditopang oleh efek positif dari aglomerasi urban atau konsentrasi industri-industri yang beragam di daerah perkotaan. Konsentrasi tersebut memiliki keterkaitan spasial yang kuat di dalam pulau Jawa sendiri dan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan per kapita dan penyerapan tenaga kerja di Jawa. Sementara itu,

perekonomian di berbagai kawasan di luar Jawa ditopang oleh efek positif dari konsentrasi aktivitas industri yang lebih terspesialisasi.

Perkembangan aglomerasi industri-industri yang beragam di Pulau Jawa berpotensi untuk berkesinambungan (*self-sustaining*) dan memiliki dampak rambatan (*spillover*) positif dalam bentuk permintaan bahan baku, barang-barang antara dan barang jadi dari luar Jawa. Data *Input Output* (IO) regional misalnya menunjukkan bahwa arah perdagangan domestik untuk barang-barang antara dan barang akhir dari luar Jawa banyak didorong oleh permintaan dari Jawa, selain oleh perekonomian global. Pembangunan Nusantara sebagai sebuah ekosistem industri berbasis inovasi selain akan memperkuat dampak *spillover* positif dari perekonomian Jawa ke luar Jawa, juga dapat memberi umpan balik positif dari sisi sebaliknya.

Oleh karena itu, baik transportasi maritim maupun darat memegang peran dalam menghubungkan aglomerasi-aglomerasi yang telah ada. Dari sisi konektivitas maritim, pembangunan pelabuhan perlu mempertimbangkan efisiensi nasional, sesuai yang telah direncanakan secara nasional. Di kawasan Jawa, pembangunan pelabuhan dapat diarahkan pada penambahan jumlah pelabuhan bongkar-muat untuk keperluan ekspor dan impor serta peningkatan kapasitas pelabuhan utama yang sudah ada saat ini. Sementara itu di luar Jawa, penguatan kapasitas pelabuhan-pelabuhan pengumpul (*collector*) dan pengumpan (*feeder*) baik regional dan lokal dapat diperkuat. Dari sisi konektivitas darat, peranan angkutan perkeretaapian nasional dalam tataran transportasi nasional perlu di dorong sehingga terintegrasi dengan layanan moda lain seperti moda udara dan darat.

Prioritas lain yang sangat penting adalah memperbesar ketersediaan modal manusia masa depan dalam rangka memperkuat kemampuan penyerapan teknologi. Dalam hal ini, simpul-simpul kebijakan yang utama adalah sebagai berikut. *Pertama*, memperluas akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di luar Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia, untuk memperkecil kesenjangan akses pada pendidikan berkualitas. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh indeks komposit pendidikan terkait kualitas infrastruktur pendidikan di Jawa dan luar Jawa. *Kedua*, memperbanyak jumlah lulusan pendidikan tersier di empat bidang, yaitu matematika, sains, teknologi dan kesehatan, dengan kualitas yang berdaya saing global. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kapasitas inovasi sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja berkualitas di bidang-bidang tersebut. Kondisi saat ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan pada kualitas pendidikan di bidang sains dan matematika agar *at par* dengan tuntutan global. Penyediaan akses yang lebih luas ke pendidikan tersier di keempat bidang studi di atas diyakini dapat memperkuat mobilitas sosial antar generasi yang terindikasi rendah di Indonesia. Hal ini juga

berimplikasi pada pentingnya kebijakan intervensi sosial untuk membuka akses yang lebih luas ke pendidikan tersier yang berkualitas.

1.5 Penutup

Perjalanan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir ini telah merefleksikan bagaimana proses transisi Indonesia dari negara berpendapatan rendah (*low income country*) menjadi negara berpendapatan menengah (*middle income country*) berlangsung relatif mudah karena besarnya anugerah sumber daya alam dan masih tingginya surplus tenaga kerja murah dalam perekonomian. Ke depan, bertransisi dengan cepat ke negara maju dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan akan jauh lebih menantang. Dalam kaitan ini, Indonesia dituntut untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, membangun kehandalan di sektor industri, membangun ketahanan di bidang energi dan pangan, dan memperkuat struktur pembiayaan perekonomian, mengembangkan kegiatan ekonomi inklusif dan memperkuat kemampuan modal pembangunannya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa langkah-langkah strategis tersebut memerlukan prasyarat, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sebagai *elements of continuity* dalam mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan yang berkelanjutan.

Dinamika perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga semakin menyadarkan kita tentang pentingnya untuk mengimplementasikan reformasi struktural yang kuat dan konsisten untuk mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang semakin meningkat tersebut. Tanpa upaya-upaya yang kuat dan konsisten untuk mempercepat transisi ke negara maju, akan sulit bagi Indonesia untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan pendapatan per kapita, menurunkan jumlah penduduk miskin yang masih jutaan jumlahnya, dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat mengganggu kohesi sosial. Kurangnya fokus pada upaya-upaya tersebut juga akan meningkatkan risiko terjebak dalam perekonomian berpendapatan menengah untuk waktu yang sangat lama (*middle income trap*), yang ditandai oleh kerentanan terhadap gejolak eksternal dan instabilitas makro, serta capaian yang sangat lambat dalam memajukan kesejahteraan umum.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron and Robert A. Robenson (2012), *Why Nations Fail: The Origins Of Power, Prosperity and Poverty*, Crown Archetype, a division of Random House, Inc.
- Anglingkusumo, Reza dan Desthy V.B. Sianipar (2012), "Proyeksi Kelas Menengah Hingga 2045", Catatan Riset Depertemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, Desember.
- Asian Development Bank (ADB) (2011), *Asia 2050: Realizing the Asian Century*, Sage, Delhi.
- Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia*, beberapa Publikasi.
- _____, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, beberapa Publikasi.
- Bank Indonesia (2015), "Kajian Output Potensial Pasca Krisis Keuangan Global 2015", Depertemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Oktober.
- Coats, David (Ed.) (2011), *Exiting from The Crisis: Towards a Model of More Equitable and Sustainable Growth*, European Trade Union Institute (ETUI).
- Felipe, Jesus and Joseph Lim (2005), "Export or Domestic- Led Growth in Asia?", *Economic and Research Department (ERD) Working Paper Series No. 69*, Asian Development Bank.
- Juhro, Solikin M. (2015), "The Role of the Central Bank in Promoting Sustainable Growth: Perspectives on the Implementation of Flexible ITF in Indonesia", A paper presented in The Singapore Economic Review (SER) Conference, August 2015, *Afro Eurasian Studies* (forthcoming).
- _____, (2013), "Penguatan Peran Bank Indonesia dan Optimalisasi Strategi Bauran Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan", Makalah SESPIBI, Bank Indonesia, Jakarta.
- _____, (2012), "The Role of Central Bank in A New Sustainable Growth Model", SEACEN and CeMCoA/BOJ Conference Proceeding, Kuala Lumpur.
- Kawai, Masahiro (2012), "Asia's Sustainable Economic Development", A Keynote Address at USM-AUT International Conference 2012 "Sustainable Economic Development: Policies and Strategies" Penang, November.
- Palley, Thomas I. (2011), "The Rise and Fall of Export-led Growth", *Levy Economics Institute Working Paper No. 675*.
- Salim, Emil (1990), "Sustainable Development: An Indonesian Perspective", Makalah , AIESEC, Jakarta.

Watt, Andrew and Andreas Botsch (Eds.). 2010, *After the Crisis: Towards a Sustainable Growth Model*. European Trade Union Institute (ETUI).